

NETRALITAS TNI PADA PEMILU 2009 DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN SIPIL DAN MILITER

Andreas Saut Simanjuntak

Pasca Sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung
Sumedang KM 21 Jatinangor, 456363
Email: andreassimanjuntak7@gmail.com

Submitted: 31-12-2023; Accepted: 04-01-2024; Published : 09-012024

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 merupakan salah satu pemilu yang ramai dibicarakan karena ada wacana mengembalikan kembali hak pilih Tentara Nasional Indonesia (TNI). Fenomena ini memunculkan kekhawatiran akan ikut campurnya instansi TNI untuk terlibat politik praktis. Tulisan ini fokus mengkaji netralitas TNI pada saat Pemilu 2009 dalam perspektif hubungan sipil dan militer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data berdasarkan studi Pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa peran sipil sebagai kontrol dalam konsep hubungan sipil militer banyak melibatkan pihak militer secara langsung ataupun tidak langsung untuk terlibat secara politik karena menganggap pengaruh militer yang masih sangat besar di daerah. Hal ini disebabkan kemampuan potisi sipil masih memiliki kekurangan dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) hal ini menyebabkan kurang percaya dirinya setiap individu politisi sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga TNI uluran Kerjasama mereka dan disisi lain secara halus masih menghendaki dukungan pilitkinya. Fenomena inilah yang membuat parpol dalam mencari politisi lokal sangat sulit. Sehingga banyak melibatkan pihak militer secara langsung ataupun tidak langsung untuk terlibat secara politik karena menganggap pengaruh militer yang masih sangat besar di daerah. Dengan kontrol sipil yang subjektif ini peran militer sendiri semakin tidak objektif atau tidak efektif karena sikap dari politisi sipil yang gagal dalam mendudukkan TNI untuk Netral. Walaupun TNI itu sendiri menolak wacana TNI untuk ikut pemilu 2009 dan memilih untuk tetap netral.

Kata kunci: Netralitas TNI; Sipil; Militer; Pemilu

Abstract

The 2009 General Election (Pemilu) was one of the elections that was widely discussed because there was talk of returning the voting rights of the Indonesian National Army (TNI). This phenomenon raises concerns that TNI agencies will interfere in practical politics. This article focuses on examining the TNI's neutrality during the 2009 elections from the perspective of civil-military relations. This research uses qualitative methods by collecting data based on literature studies. The results of this research are that the role of civilians as control in the concept of civil-military relations involves the military directly or indirectly becoming politically involved because they assume the military's influence is still very large in the region. This is because the ability of civilian politicians still lacks in terms of Human Resources (HR). This causes each individual civilian politician to lack confidence in carrying out their duties and functions so that the TNI offers their cooperation and on the other hand, in a subtle way, they still want their political support. This phenomenon makes it very difficult for political parties to find local politicians. So many involve the military directly or indirectly to get involved politically because they think the military's influence is still very large in the region. With this subjective civilian control, the role of the military itself is increasingly less objective or ineffective because of the attitude of civilian politicians who fail to position the TNI as Neutral. Although the TNI itself rejected the TNI's discourse to participate in the 2009 elections and chose to remain neutral.

Key Word: Neutrality TNI; Civil; Military; Election

PENDAHULUAN

Pada tahun 2004 Indonesia melakukan Pilpres yaitu dari Era Megawati ke Era SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). SBY sendiri merupakan Presiden ke enam dan seorang purnawirawan Militer dengan jabatan terakhir sebagai Jenderal dari TNI. Pada tahun 2004-2006 Pimpinan TNI tertinggi pada saat itu adalah Jenderal Endriartono Sutarto, Endriartono Sutarto menjabat pada tahun 2002-2006. Dia menjabat sebagai Panglima dari Era Megawati sampai periode pertama SBY. Jenderal Endriartono dipertahankan SBY menjadi Panglima meskipun dia telah menjadi Panglima di Era Megawati. Jenderal Endriartono sendiri belum diganti padahal dia sudah memasuki masa pensiun dari dinas adktif. Untuk mempertahankan itu Presiden SBY memperpanjang masa aktif Dinas Jenderal Soetarto (Hamdan M.Basyar. dkk, 2005). Dari proses mempertahankan Jenderal Soetarto sebagai Panglima TNI menandakan adanya kepentingan Politik yang terjadi pada saat proses pemilu 2004. Seiring berjalannya periode pertama 2004-2009 Presiden SBY juga memantapkan diri untuk maju pada pilpres 2009. Pada saat itu Presiden SBY menggandeng Jusuf Kalla sebagai wakil Presidennya. Dengan pengalaman Pemilu 2004 ada kemungkinan SBY akan melaksanakan hal yang serupa. SBY yang memiliki latar belakang Pilpres dan juga ditambah lagi dengan istilah Perang Bintang dari para Jenderal dalam kontestasi politik pada saat pemilu 2009.

Indonesia sendiri sebagai negara demokrasi yang menghargai otoritas sipil diperlukan pengelolaan hubungan sipil-militer yang tepat. Di akhir masa jabatannya mantan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto memberikan "pesan" sangat besar kepada penggantinya yakni, Marsekal Djoko Suyanto. Dia menitip pesan agar TNI diperjuangkan mendapat hak-hak politik dalam Pemilu 2009. Dari statement ini telah memicu polemik politik diberbagai media massa ihwal TNI ikut Pemilu 2009, yang sebenarnya ketidakpastian hak memilih bagi anggota TNI dan Polri sebagai warga negara Indonesia merupakan masalah lama(TNI Puspen, 2006). Sehingga isu sipil-militer masih isu penting karena perhatian Masyarakat yang begitu antusias pasca orde baru. Gerakan Reformasi 1998 di Indonesia menghasilkan reformasi internal Tentara Nasional Indonesia tahun 1999 (reformasi TNI). Reformasi ini bentuknya adalah proses penarikan diri

institusi militer dari politik (military withdrawal from politics), dengan dilakukannya penghapusan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Reformasi TNI pada tahun 1999, telah menunjukkan terselesaikannya hal-hal yang paling penting yaitu penanggalan Dwifungsi ABRI, dengan wujud implementasi melepaskan peran sosial politik TNI. Dengan demikian, TNI tidak lagi melibatkan diri dalam politik partisan sebagai bagian dari Golongan Karya (Golkar), melikuidasi Fraksi TNI/Polri di MPR, DPR dan DPRD, serta menanggalkan doktrin kekaryaan dengan tidak lagi menempatkan prajurit aktif TNI dalam jabatan sipil. Penghapusan doktrin ini telah mendorong tentara meninggalkan posisi dan peran politik formalnya. Meski militer tidak menjadi unsur dominan dalam politik Indonesia pasca reformasi, tetapi militer masih dianggap merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan. Hal ini secara jelas dapat diamati dari fenomena masuknya purnawirawan TNI ke ranah politik seperti memilih jalan masuk partai politik (parpol) (Djafar, 2015). Dengan penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI, bentuk relasi sipil dan militer yang baru di era reformasi menempatkan militer di bawah supremasi sipil. Jika supremasi sipil dipandang sebagai suatu doktrin politik, sejauh ini tentu saja supremasi sipil masih diragukan sepenuhnya telah menggantikan "dwifungsi," (Yuddy Chrisnandi, 2007).

Wacana hubungan sipil-militer merupakan bentuk dari supremasi sipil atas militer itu sendiri. Permasalahan mendasar Hubungan Sipil dan Militer dalam konteks demokratisasi adalah terwujudnya sipil atas militer. Penggunaan istilah supremasi sipil (*civil supremacy*) dalam konteks hubungan sipil militer menurut (Prihatono, 2007) harus dimengerti sebagai suatu kedaulatan rakyat. Dalam hal ini kedaulatan rakyat harus dimaknai bahwa semua rakyat adalah warga negara yang menjadi *stakeholder*. Kepatuhan dan ketundukan militer pada pemerintahan yang dipilih dan ditunjuk secara demokratis melalui Pemilu itulah yang menurut (Kohn, 1997) dimaknai sebagai supremasi sipil. Hubungan sipil militer juga merupakan sebuah wacana yang

tidak terlepas dalam konteks demokratisasi (Prihatono, 2007). Definisi hubungan sipil militer sangat beragam namun secara garis besar hubungan ini dapat didefinisikan sebagai interaksi antara lembaga militer di satu sisi dengan pengambil keputusan negara/pemerintah, lembaga swadaya Masyarakat (LSM), pemimpin opini publik dan masyarakat disisi lainnya, termasuk didalamnya adalah acara dengar pendapat dan pengajuan perencanaan pembangunan kekuatan pertahanan nasional berbasis “efektivitas-biaya” serta pertanggungjawaban produk dan “*outcome*” kekuatan militer selama ini didepan Parlemen, dan masih banyak lagi perwujudan hubungan sipil militer yang demokratis (Djuyandi Yusa, 2019). Dinamika hubungan sipil militer bisa ditangkap dalam pengertian yang lebih luas sebagai hubungan antara Masyarakat dengan lembaga-lembaga militer, dimana masyarakat lebih melihat ada harapan dan peluang militer akan bertindak untuk melindungi kepentingan publik/masyarakat terhadap serangan dari luar. Harapan publik tersebut adalah bentuk perwujudan kontrol sipil, dengan demikian secara tidak langsung mengisyaratkan dan membenarkan bahwa hubungan sipil militer merupakan aspek penting dalam strategi keamanan nasional. Timbulnya kesadaran seperti ini lebih dikarenakan pemahaman bahwa kepentingan nasional diposisikan sebagai jembatan antara keamanan nasional dan tujuan nasional yang mendasar (*fundamental national's goal*). Dengan adanya kepentingan nasional sebagai subordinasi tujuan nasional yang mendasar, kepentingan nasional yang kemudian akan mendikte strategi keamanan nasional dan strategi-strategi nasional lainnya seperti diplomatik, informasional, militer dan ekonomi nasional (Djuyandi Yusa, 2019). Feaver (Andrews, 2008) dengan Teori Ajensinya menjelaskan ada empat (4) pola hubungan sipil militer seperti tergambar dibawah ini:



Keterangan Gambar :

1. Civilians Monitor Intrusively (CMI) - Military Works (MW) (Subjective Control)
2. Civilians Monitor Intrusively (CMI) - Military Shirks (MS)
3. Civilians Monitor Unobtrusively (CMU) - Military Works (MW) (Objective Control)
4. Civilians Monitor Unobtrusively (CMU) - Military Shirks (MS)

Sumber: (Djuyandi Yusa, 2019)

Gambar dalam pola hubungan sipil-militer dalam Teori Ajenasi

Teori Ajensi menjelaskan arah (kecenderungan) kontrol sipil subyektif akan bergerak semakin kekiri dan kontrol obyektif bergerak semakin kekanan. Bentangan dua kutub kontrol tersebut dibagi dalam 4 kategori mulai dari CMIMW (Ekstrim subyektif) sampai dengan CMU-MS diujung kanan (Ekstrim obyektif). Selain Feaver, definisi kontrol sipil obyektif maupun subyektif sudah banyak dijelaskan Huntington. Kontrol sipil obyektif intinya meyakinkan bahwa elit militer semakin efektif dengan catatan meminimumkan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan nasional. Definisi kontrol sipil obyektif maupun subyektif ada kaitannya dengan teori Peter Feaver. *Policy* (kebijakan) adalah produk elit sipil, dan elit militer yang akan melaksanakannya, suatu demonstrasi bahwa militer adalah subordinasi sipil. Meningkatnya manuver kegiatan militer ke arah kontrol sipil subyektif memposisikan otoritas dan kebiasaan sipil menurun untuk mengontrol militer, serta semakin melibatkan militer dalam kancah politik dan isu kelembagaan strategi keamanan nasional. Semakin besar efektivitas militer didera situasi ini akan mengurangi kapabilitas (*capabilities = abilities + "outcome"*) militer untuk mempertahankan negara. Memaksimumkan kontrol sipil obyektif sebagai cara terbaik mencapai hubungan sipil militer yang efektif. Bahwa kehadiran kontrol sipil obyektif sangat diperlukan dalam hubungan sipil militer yang efektif, pelaksanaan hubungan sipil militer tidaklah begitu saja harus tunduk kepada aturan seperti damai atau perang, akan tetapi lebih kepada ideologi antara masyarakat sipil dan etika profesional militer.

Civil-military relations menurut Huntington adalah peran militer di dalam masyarakat yang biasanya didiskusikan dengan istilah kontrol sipil. Kontrol sipil terbagi menjadi dua jenis yakni subjective civilian control dan objective civilian control. Subjective civilian control adalah bentuk kontrol yang terjadi ketika kekuatan sipil dimaksimalkan secara penuh sehingga keberadaan militer hanya berada pada tingkat paling minimal atau tidak berarti sama sekali. Karena banyaknya aktor sipil yang masing-masing memiliki kuasa dan saling memengaruhi, maka pemaksimalan

kekuatan sipil hanya terjadi pada aktor sipil tertentu saja. Terdapat tiga bentuk *subjective civilian control* yakni *civilian control by government institution*, *civilian control by social class*, dan *civilian control by constitutional form*. *Civilian control by government institution* adalah bentuk kontrol sipil melalui pemaksimalan institusi pemerintah sebagaimana yang dapat ditemui pada pemerintahan monarki absolut. *Civilian control by social class* adalah bentuk kontrol sipil yang dilakukan oleh kelas sosial tertentu seperti kelompok aristokrat dan borjuis liberal yang dapat memegang kendali dengan pengaruh dan kekuatan ekonomi yang dimilikinya. Sementara *civilian control by constitutional form* adalah bentuk kontrol sipil melalui hukum atau sistem pemerintahan pembentuk hukum tertentu misalnya keberadaan konstitusi yang dibangun oleh sistem demokrasi. Sedangkan *objective civilian control* adalah bentuk kontrol sipil terhadap militer dengan memaksimalkan profesionalisme dari militer atau adanya distribusi kuasa antara militer dan sipil yang menciptakan keprofesionalan militer itu sendiri. Ketika *subjective civilian control* berakhir dengan mensipilkan militer, *objective civilian control* berakhir dengan memiliterisasi militer hingga menjadikan mereka sebagai instrumen negara. Terdapat dua tingkatan dalam civil-military relations yang perlu diperhatikan dalam upaya memaksimalkan profesionalisme militer dan tujuan dari kontrol sipil, yakni tingkatan kuasa dan tingkatan ideologi. Kuasa memiliki dua bentuk yakni sebagai otoritas formal (*formal authority*) dan pengaruh informal (*informal influence*) (Muhammad Fadilah & Sudirman, 2018). Semakin tinggi tingkat otoritas sebuah kelompok, semakin tinggi tingkat persatuan strukturnya dan semakin luas cakupan otoritasnya, maka ia akan semakin kuat dari segi kuasa yang dimiliki. Tingkatan otoritas mengacu pada posisi yang ditempati oleh kedua kelompok (sipil dan militer) di dalam hierarki dari otoritas pemerintahan. Artinya, dengan posisi otoritas yang lebih tinggi dapat mengontrol yang lebih rendah pada hierarki otoritas pemerintah, sipil dapat melakukan kontrol terhadap militer begitu juga sebaliknya. Dalam tingkatan pengaruh informal terdapat empat hal yang diperhatikan yakni afiliasi dari kelompok sipil dengan korps perwira dan pimpinan militer, subjek sumber daya manusia dan ekonomi terhadap otoritas dari korps perwira dan pimpinan militer, interpenetrasi hierarkis dari korps perwira dan pimpinan militer,

serta prestise dan popularitas dari korps perwira dan pimpinan militer (Muhammad Fadilah & Sudirman, 2018)

Hubungan sipil dan militer juga dipengaruhi pada tingkatan ideologis yaitu sebuah ideologi mayoritas yang dianut akan memengaruhi etika atau perilaku militer di sebuah negara. Contohnya ideologi liberalisme pada umumnya akan melakukan penolakan terhadap pemberian senjata dan standing armies, ideologi fasisme mendorong kepemilikan dari angkatan bersenjata yang kuat, ideologi marxisme tidak melihat militer sebagai sesuatu yang sangat diperlukan tetapi lebih menitikberatkan kepada kuasa yang dihasilkan oleh ekonomi, sedangkan ideologi konservatisme kurang lebih memiliki persamaan dengan etika militer yang telah ada (Muhammad Fadilah & Sudirman, 2018)

Menurut Huntington (Djuyandi Yusa, 2019) kontrol sipil obyektif fokus kepada memaksimalkan dan memperkuat profesionalisme militer, yakni dengan adanya pembagian kekuasaan antara kelompok militer dan kelompok sipil. Tujuan akhir dari kontrol sipil obyektif adalah memiliterkan kelompok militer sehingga mereka dapat fokus menjadi alat negara untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Berbeda dengan Huntington yang melihat hubungan sipil militer dari kacamata ilmuwan politik, Janowitz melihatnya dari kacamata sosiologi. Menurutnya prajurit profesional harus berada di atas politik bahkan jauh di atas politik, meskipun kenyataannya tidak selalu begitu. Untuk melanjutkan sebagai kekuatan profesional dan bisa menjawab dilema dikemudian hari, elit militer harus menstransformasikan dirinya menjadi kekuatan konstabulari. Teori yang dikembangkan ini berdasarkan ide bahwa militer dapat diubah melalui kontrol politik sipil, sebab para perwira menyadari betul bahwa elit sipil dan masyarakat umumnya akan lebih menghargai dan mengenal tugas dan tanggung jawab kekuatan konstabulari (Djuyandi Yusa, 2019). Janowitz mengungkapkan sebagai kekuatan konstabulari, militer akan menjamin profesionalisme dan integrasinya dengan rakyat.

Janowitz menciptakan teori yang parallel dengan Huntington, dimana Huntington tetap memosisikan profesionalisme militer di luar masyarakat, sebaliknya Janowitz percaya bahwa militer dan rakyat seharusnya berintegrasi mewujudkan hubungan sipil militer yang lebih baik. Hal ini menurut Huntington mencerminkan kontrol sipil yang subyektif, sedangkan Janowitz yang percaya adanya garis samar-samar antar sipil dan militer justru menegaskan teori Huntington yang percaya bahwa militer harus berdiri terpisah dan otonom dari masyarakat sipil guna mempertahankan profesionalismenya. Apapun juga perbedaannya kedua pakar teori hubungan sipil militer ini setuju bahwa militer semestinya harus mempertahankan profesionalismenya (Djuyandi Yusa, 2019).

Samuel Huntington memberikan elaborasi tentang tumbuhnya profesionalisme militer, yang menurutnya memiliki tiga ciri pokok. Ciri yang utama adalah keahlian, sehingga profesi militer kian menjadi spesifik serta memerlukan pengetahuan dan keterampilan. Suatu kekuatan militer memerlukan pengetahuan yang mendalam untuk mampu mengorganisir, merencanakan dan mengarahkan aktivitasnya, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai. Dan keahlian khusus itu berhubungan dengan kontrol terhadap organisasi manusia yang tugas utamanya adalah menggunakan kekerasan, sehingga Harold Lasswell menyebut para perwira militer sebagai pengelola kekerasan (*managers of violence*). Ciri kedua dari militer profesional adalah tanggung jawab sosial yang khusus. Disamping memiliki nilai-nilai moral yang tinggi yang harus terpisah samasekali dari insentif ekonomi, seorang perwira militer mempunyai tanggungjawab pokok kepada Negara. Pada masa profesionalisme, seorang perwira berhak mengoreksi komandannya, jika si Komandan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan nasional (*national interests*). Dan ciri ketiga adalah karakter korporasi (*corporate character*) para perwira yang melahirkan rasa *esprit de corps* yang kuat, berbeda dengan kelompok profesi yang lain, korps perwira militer merupakan suatu "birokrasi profesional" karena anggota-anggotanya mengabdikan pada birokrasi Negara.

Ketiga ciri militer profesional tadi melahirkan apa yang oleh Huntington disebut sebagai *the military mind* yang menjadi dasar bagi hubungan militer dan Negara. Etik militer menekankan sifat permanen, irasionalitas, dan

kelemahan manusia, serta supremasi masyarakat terhadap individu. Inti *the military mind* adalah suatu ideologi yang berisi pengakuan militer profesional terhadap supremasi pemerintahan sipil (Perlmutter, 1984).

Hubungan sipil-militer di dunia ketiga, pada umumnya, militer di manapun akan memiliki kecenderungan lebih besar untuk melibatkan diri dalam politik nasional apabila ada faktor-faktor berikut. *Pertama*, apabila ada kelompok-kelompok kuat dalam masyarakat yang mengancam eksistensi angkatan bersenjata. *Kedua*, militer akan melakukan intervensi politik untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar yang oleh korps perwira dianggap lebih sesuai dengan struktur-struktur politik yang ada dalam masyarakat. *Ketiga*, walaupun kepentingan bersama dari pihak militer merupakan faktor penting, hal ini tidak mungkin terjadi apabila tidak ada kesempatan. Hubungan sipil-militer telah berkembang di setiap Negara sesuai dengan proses dan kondisi historis khusus mereka. (Ridho, 2019)

Dengan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti tentang netralitas TNI pada pemilu 2009 dari perspektif hubungan sipil-militer. Rumusan Masalah Bagaimana sikap TNI terhadap netralitas TNI pada pemilu 2009. Penulis akan menjelaskan dari perspektif hubungan sipil-militer.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan Hubungan Sipil dan militer yang akan berimplikasi dengan Politik Militer untuk menjawab Netralitas TNI. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Nazir, 2003). Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada empat ciri utama yang penulis perlu perhatikan diantaranya :

Pertama, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung kelapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh runga dan waktu (Mestika, 2003). Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

Langkah-langkah dari studi kepustakaan menurut (Siregar, 2017): a. Formulasi permasalahan. Pilihlah topik sesuai dengan isu dan interest. Permasalahan harus ditulis dengan lengkap (complate) dan tepat. b. Cari literature. Temukan literature yang relevan dengan penelitian. Langkah ini membantu kita untuk mendapatkan gambaran (overview) dari suatu topik penelitian. Sumber-sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan dikaji. Karena sumber-sumber tersebut akan memberikan macam gambaran tentang ringkasan dari penelitian terdahulu. c. Evaluasi data. Lihat apa saja kontribusinya terhadap topik yang dibahas. Cari dan temukan sumber data yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Data ini berupa data kualitatif, data kuantitatif maupun data yang berasal dari kombinasi keduanya. d. Analisis dan interpretasikan. Diskusikan dan temukan ringkas literature

Setelah teknik pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut akan diolah, dianalisa, dan dilakukan interpretasi data, sehingga akan menghasilkan suatu temuan dengan pengupayaan dihasilkannya kebaruan riset, disamping hasil penelitian yang dihasilkan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan (Hardiansyah, 2010); (Faisal, 2008), Kemudian uji validitas dalam penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan kesahihan data dalam penelitian. Hal yang dilakukan yaitu dengan mendapatkan

data yang akurat melalui penyajian gambaran yang jujur tentang pengalaman hidup subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan demokrasi pasca otoritarianisme, sejak 1998, mulai ada perubahan bahkan redefinisi baru atas peran politik militer sebagaimana telah disinggung, Konsep tersebut bercorak kompatibel antara satu dengan yang lain, dan merefleksikan pertumbuhan gradual usaha pengaturan institusi militer sering dengan meningkatnya tuntutan agar demokrasi dijadikan sebagai mode politik. Pengaturan institusi militer dalam konteks demokrasi, terkait dengan posisi dan peran politiknya dan variable keterlibatan mereka dalam proses politik, serta pemilihan umum. Kita harus akui bahwa pilar penting untuk mengakhiri keterlibatan militer telah dikukuhkan melalui tuntutan reformasi sejak 1998 tersebut. Tuntutan ini secara internal direspon dengan keluarnya paradigma baru TNI pada pemilu 1999. Pada pemilu 2009 tidaklah jauh berbeda, menurut peraturan perundang-undangan pihak TNI netral secara politik. Bahkan Ketika muncul perubahan UU pemilu, agar TNI diberi hak untuk ikut memilih dengan tegas panglima TNI mengakatan tidak menggunakannya dengan alasan agar netral secara politik. Pemilu legislatif dan Presiden 2009 merupakan pemilu ketiga era reformasi yang sukses diselenggarakan dengan damai. Meskipun ada wacana dipulihkannya hak pilih TNI dalam pemilu.

Hubungan antara TNI dan Elit Pemerintahan Sipil dan Partai Politik

Sebelum membahas mengenai Netralitas TNI pada pemilu tahun 2009, akan dibahas terlebih dahulu konteks yang mempengaruhinya serta hubungan antara TNI dengan elit pemerintahan sipil dan partai-partai politik. SBY merupakan salah satu Presiden yang saat itu meruaoakan purnawirawan TNI. Dengan memilik latar belakang kemiliteran akan lebih mudah mendapat dukungan dari militer. Sedangkan Golkar diuntungkan pada saat itu karena

banyaknya keterlibatan purnawirawan TNI yang terlibat dalam kegiatan kepartaian (Basyar, 2005). Dengan kondisi demikian maka para purnawirawan melemparkan wacana dipulihkannya hak pilih TNI dalam pemilu. Di Negara pasca-otoriter, berbagai hak prerogative atau privilese militer yang merupakan warisan rezim lama menjadi tolak ukur kekuatan politik militer. Misalnya keterkaitan dan perwalian (*guardianship*) militer atas kepentingan nasional; tetap beredarnya perwira aktif dan/atau non-aktif dalam politik dan pemerintahan; kekebalan hukum atas pelanggaran HAM masa lalu; otonomi anggaran pertahanan keamanan; minimnya diskusi terbuka dan tingginya kerahasiaan permasalahan militer di ranah publik. Dengan uraian diatas dapat kita tarik kesimpulan tentang hubungan antara militer dengan elit pemerintahan beserta partai politik sangat dekat karena dalam melahirkan kebijakan yang mendukung instansi militer begitu cepat serta diberikan ruang untuk wacana mengembalikan hak pilih TNI di era reformasi. Militer sebagai bagian dari masyarakat Indonesia atau bagian warga negara merupakan alat negara oleh karenanya posisi militer harus dependent (tergantung) pada keputusan pemimpin politik. Sebagai cermin dari kedaulatan rakyat otonomisasi militer dari sipil akan memberikan peluang untuk tidak bertanggung jawab apalagi harus tunduk pada kepemimpinan sipil. Sementara pihak militer beralasan kalau militer harus tunduk pada pemimpin sipil maka yang terjadi adalah politisasi militer (kontra subyektif) yang akan mengganggu statusnya sebagai the guardian of the state. Oleh karenanya militer lebih menghendaki hubungan yang bersifat equal relationship (hubungan setara), tidak ada yang menguasai dan dikuasai, tidak ada ordinat dan subordinat (Setiawan, 2013). Gejala gejala meningkatnya peran politik TNI dapat dirasakan dari mulainya kabinet dan orang-orang kepercayaan presiden yang sebagai besar adalah tantara, serta mulai masuknya para perwira untuk turut serta memperebutkan jabatan gubernur, bupati dan walikota (Basyar, 2005).

Hubungan sipil dan Militer

Netral diartikan tidak memihak, tidak mempunyai muatan politis, dan berdiri di tengah sebagai wasit sehingga makna ini menunjukkan menempatkan TNI sebagai penjaga, sebagai pemantau, siaga mengamankan dan bersikap seadil-adilnya.

Netralitas TNI merupakan amanat dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, yaitu TNI bersikap netral dalam kehidupan politik praktis. Namun sipil tetap memberikan ruang politik untuk militer dengan cara mereduksi ketentuan tersebut dengan melahirkan UU No.32 tahun 2005 tentang pemerintahan Daerah, khususnya dalam pilkada, bahwa TNI aktif boleh mencalonkan diri. Menurut PP No.6/2005 pasal 42 ayat (2) F menyebutkan, anggota TNI dan PNS TNI dapat dicalonkan untuk ikut pilkada dengan ketentuan bahwa selama proses Pilkada yang bersangkutan harus lepas dari jabatan tanpa harus pensiun dari dinas TNI, merupakan suatu kemunduran. Berkaitan dengan adanya PP tersebut, panglima TNI telah menerbitkan surat telegram Nomor: STR/222/2005 tanggal 13 April 2005 tentang ketentuan, tata cara pelaksanaan dan sikap Netralitas TNI pada Pilkada. Apabila anggota TNI mengajukan diri sebagai calon, maka yang bersangkutan kepada atasan masing-masing; Atasan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan pengunduran diri secara hierarki sampai kepada Kas Angkatan masing-masing, selanjutnya apabila Kas Angkatan menyetujuinya, Kas Angkatan mengajukan kepada Panglima TNI; Panglima TNI mengeluarkan surat izin bagi anggota TNI dan PNS TNI yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pilkada, serta memutuskan penonaktifan sementara dari jabatan maupun dinas aktif keprajuritan dari yang bersangkutan (Basyar, 2005). Dengan kebijakan diatas kita sangat menyayangkan terjadinya sebuah kemunduran. Disini dapat kita lihat sebuah fenomena sipil masih menghendaki agar TNI tetap berpolitik. Karena itu ada asumsi kuat bahwa di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhono politik militer akan kembali lagi, bukan hanya sekedar dapat dirasakan karena dalam praktik politik gejala-gejala meningkatnya peran politik TNI sudah dapat dirasakan. Mulai dari kabinet dan orang-orang kepercayaan presideng yang Sebagian besar adalah tantara, serta mulai masuknya para perwira untuk turut serta memperebutkan jabatan gubernur, bupati, dan walikota. Asumsi bahwa politisi sipil memmang menghendaki kembali TNI berpolitik praktik tampak dari

pernyataan-pernyataan Ferry Mursyidan Ketua Komisi II DPR RI pada saat itu yang mengatakan, "menilai pencalonan TNI dalam pilkada belum menyentuh aspek politik praktis (KEMENSESNEG RI, 2007). Politik Praktis menurutnya Ketika TNI sudah terlibat dalam partai politik. "Akil Mochtar, anggota dari Fraksi Golkar yang pada periode sebelumnya duduk dalam pembahasan UU No. 32/2005 tentang pemerintahan Daerah di Komisi II juga mengatakan hal yang sama. Ia mengatakan anggota TNI aktif dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah karena bagian dari haknya sebagai warga negara (Basyar, 2005) . Dari pandangan anggota dewan ini jelas bahwa politisi sipil sepertinya inkonsisten untuk tetap mendudukkan TNI yang netral dalam politik. Sikap politisi sipil dan partai politik inilah yang sebenarnya merusak upaya-upaya untuk mengembalikan profesionalisme TNI. Padahal salah satu syarat agar reformasi internal TNI berhasil untuk mengembalikan peran dan fungsi utama mereka adalah keyakinan dan konsistensi para politisi sipil yang duduk di legislatif maupun elit partai, meninggalkan cara-cara lama untuk menggunakan kekuatan militer sebagai salah satu cara agar dapat berkuasa. Padahal, keluarnya TNI dari politik merupakan amanat konstitusi, amandemen UUD. Seharusnya menjadi komitmen semua pihak, baik militer maupun sipil. Inkonsisten politisi sipil dalam konsep netralitas telah mempengaruhi pemilu 2009 nantinya. Padahal upaya untuk mengembalikan TNI sesuai dengan peran dan fungsi yang sebenarnya justru berangkat dari kenyataan bahwa TNI semakin tidak profesional di bidangnya, karena terlalu lama bermain politik. Namun dari pihak TNI sendiri sendiri pada pemilu 2009, sikap netral TNI kembali diuji. Dengan SBY yang kembali maju menjadi Pilres. Meskipun sudah berstatus sipil. Tetap saja, terkait netralitas TNI masih kerap dipertanyakan. Dengan peran sipil yang belum menguat yaitu politisi sipil yang memanfaatkan oknum dan institusi TNI untuk digiring keranah politik praktis. Belum lagi dengan perang Bintang yang terjadi pada era itu. Banyak para purnawirawan yang maju melalui legislatif dan eksekutif. Pada pemilu 2004 yang sangat menentukan proses pemilu di 2009 justru menunjukkan masih adanya upaya dari parpol untuk menarik jajaran TNI untuk kepentingan politiknya. Partai politik merangkul purnawirawan karena kepercayaan Masyarakat. Jadi kepercayaan parpol dan Masyarakat kepada

purnawirawan dan TNI yang cukup tinggi sehingga ada kepentingan dan harapan dari rakyat yang akan memberikan suaranya. Lalu parpol juga berusaha merebut suaranya dari keluarga TNI karena sifat kerabatannya di dalam keluarga TNI, sikap hormat dan loyalitas yang tinggi, Dapat dengan cepat mengkomunikasikan kepada salah satu parpol yang dapat diharapkan perhatiannya kedepan terhadap nasib prajurit dan purnawirannya. Namun kembali lagi sikap politik TNI sebagai institusi dalam Pemilu 2009 di muka publik tetap menunjukkan netralitasnya. Namun secara individual ada kecenderungan -kecenderungan untuk mendukung salah satu partai politik. Perbandingannya pada saat masa Orba, dukungan politiknya hanya kepada Golkar, tetapi di masa transisi relative menyebar. Salah satu contohnya pada masa transisi era megawati dan SBY dimana SBY mempertahankan Panglima yang mana sudah seharusnya pensiun namun memperpanjang masa kerjanya. Sehingga Demokrat yang merupakan Partai SBY dikenal sangat dekat dengan Militer. Upaya-upaya untuk menarik militer kembali ini disebabkan salah satunya oleh rendahnya kapasitas SDM dari kalangan-kalangan politisi local. Ada oknum yang hanya tamatan SD namun memanipulasi izajah SMA dan upaya upaya manipulatif lainnya untuk mencapai kekuasaan. Faktor kekurangan SDM ini lah yang menyebabkan kekuatan TNI di satu sisi memanfaatkan uluran Kerjasama mereka dan disisi lain secara halus masih menghendaki dukungan politiknya. Faktor kekurangan SDM ini lah membuat parpol dalam mencari politisi lokal sangat sulit. Sehingga banyak melibatkan pihak militer secara langsung ataupun tidak langsung untuk terlibat secara politik karena menganggap pengaruh militer yang masih sangat besar di daerah. Dengan menggunakan konsep teori ajensi maka kita melihat dengan kontrol sipil yang semakin lalai dengan ditandai kebutuhan sipil akan militer sehingga melibatkan militer dalam posisi posisi strategis akan membuat militer semakin kuat Teori Ajensi diatas menjelaskan arah (kecenderungan) kontrol sipil subyektif akan bergerak semakin ke kiri dan kontrol obyektif bergerak semakin ke kanan. Bentangan dua kutub kontrol tersebut dibagi dalam 4

kategori mulai dari CMIMW (Ekstrim subyektif) sampai dengan CMU-MS diujung kanan (Ekstrim obyektif). Dengan kontrol sipil yang subjektif karena memiliki kepentingan politik dalam beberapa kasus diatas maka peran militer sendiri semakin tidak objektif atau tidak efektif karena sikap dari politisi sipil yang gagal dalam mendudukkan TNI untuk Netral. Walaupun TNI itu sendiri menolak wacana TNI untuk ikut pemilu 2009 dan memilih untuk tetap netral.

SIMPULAN

Budaya Negara yang mengalami transisi dari otoritarianisme ke demokrasi oleh politikus sipil masih dipandang sebagai kekuatan politik yang sangat berpengaruh. Di sini definisi militer tak sebatas instrumen pertahanan keamanan, tapi melekat juga dalam dirinya fungsi "akumulasi kekuasaan". Organisasi militer bukan saja diciptakan untuk mendukung sebuah cita-cita politik negara. Penguasaan terhadap militer oleh sipil memiliki implikasi jauh dari itu. Militer dimanfaatkan sebagai bagian dari jejaring kekuasaan. Dalam konteks penataan format hubungan sipil-militer dan dengan tegasnya prinsip netralitas pada pemilu 2009 malah dimanfaatkan untuk mencapai kekuasaan. Hal ini memberikan ruang-ruang politis untuk militer dalam mengambil posisi strategis untuk mendukung dominasi itu sendiri. Pada pemilu 2009 sendiri melalui konsep agensi peneliti mensimpulkan bahwa kontrol sipil yang subjektif karena memiliki kepentingan politik dalam beberapa kasus pembahasan diatas maka peran militer sendiri semakin tidak objektif atau tidak efektif karena sikap dari politisi sipil yang gagal dalam mendudukkan TNI untuk Netral. Walaupun TNI itu sendiri menolak wacana TNI untuk ikut pemilu 2009 dan memilih untuk tetap netral.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, B. M. (2008). *Patterns of Civil-Military Relations In Democracies*. School of Advanced Military Studies.
- Basyar, M. H. dkk. (2005). *Hubungan Sipil dan Militer Era Megawati*.
- Djafar, TB. M. (2015). *Krisis Politik & Proposisi Demokratisasi Perubahan Politik Orde Baru ke Reformasi: Vol. xiv*. PT. Bumi Aksara.
- Djuyandi Yusa. (2019). *Hubungan Sipil dan Netralitas TNI Pada Pemilu 2009 Dalam Perspektif Hubungan Sipil Dan Militer (Andreas Saut Simanjuntak)*
- Militer dalam Diskursus RUU Keamanan Nasional: Vol. cet-1*. DIVA Press.
<https://www.researchgate.net/publication/340502910>
- Faisal, S. (2008). *Format-format Penelitian Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hardiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- KEMENSESNEG RI. (2007). *Hak Pilih TNI Belum Digunakan pada Pemilu 2009*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
https://www.setneg.go.id/baca/index/hak_pilih_tni_belum_digunakan_pada_pemilu_2009
- Kohn, R. H. (1997). How Democracies Control the Military. *Journal of Democracy, vol.8 No.4*.
- Mestika, Z. (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad Fadilah, E., & Sudirman, A. (2018). Analisis Hubungan Sipil-Militer terhadap Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang di Tahun 2015. *Jurnal Hubungan Internasional, 7(1)*.
<https://doi.org/10.18196/hi.71123>
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Perlmutter, A. (1984). *Militer dan Politik*. Rajawali.
- Prihatono, T. H. dkk. (2007). *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik Kebijakan*. ProPatria Institute.
- Ridho, M. Z. (2019). TNI dan Konflik Sosial: Dilema Reformasi TNI Dalam Penanganan Konflik Sosial di Indonesia. *Jurnal UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol. 10 No. 2*.
- Setiawan, David. dkk. (2013). *Perkembangan Hubungan Militer dengan Sipil di Indonesia*.
- Siregar, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Kencana.
- TNI Puspen. (2006, March 6). *TNI Ikut Pemilu 2009*. Puspen TNI.
<https://tni.mil.id/view-2203-tni-ikut-pemilu-2009.html>